

Berita Lingkungan Hidup

Pasar Liar Ditertibkan demi Adipura

Ketertiban Kota

JAKARTA – Demi mengejar penghargaan Adipura, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyapu sejumlah pasar liar yang selama ini menjadi andalan dalam meraup pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah itu diambil karena pasar-pasar menunjukkan ketidaktertiban dan ketidakindahan. “Kami ingin ketertiban di Jakarta bisa benar-benar terwujud.

Karenanya, semua aktivitas yang terjadi di tempat yang dilarang akan menjadi sasaran operasi kami,” tegas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Harianto Badjoeri di Jakarta, Rabu (24/2).

“Selain menertibkan pasar, Satpol PP akan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas yang menyebabkan kemacetan.”

Lokasi yang sudah terdeteksi oleh Satpol PP untuk segera ditertibkan adalah Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Pasar Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kedua lokasi tersebut, selain menjadi titik keramaian, selalu menimbulkan kemacetan.

Salah satu penyebab timbulnya kemacetan di lokasi tersebut, dijelaskan Harianto, adalah masih banyak pedagang dan atau warga yang memanfaatkan bahu jalan dan trotoar sebagai lokasi berjualan.

Padahal, pemanfaatan lahan tersebut, selain melanggar Perda No 8 Tahun 2008, mengganggu kenyamanan dan ketertiban para pejalan kaki.

Untuk pasar tradisional yang statusnya liar atau tidak tidak terdaftar, Harianto mengatakan juga akan menjadi incaran dari penertiban tersebut.

Namun, karena statusnya tidak terdaftar, hingga saat ini, belum ada data pasti berapa jumlah pasar liar yang ada di Jakarta.

“Yang jelas, semua lokasi liar tersebut akan ditertibkan. Salah satunya untuk menyukseskan pelaksanaan pergelaran Adipura tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jakarta Utara Sulistyarto membenarkan bahwa persiapan penyelenggaraan Adipura menjadi salah satu faktor aksi penertiban.

Tetapi aksi tersebut diharapkan bisa terus dilakukan meski gelaran Adipura sudah selesai dilaksanakan.

“Sebenarnya kalau di Jakarta Utara aksi yang dilakukan bukan penertiban, tapi pemindahan atau relokasi. Semua tempat yang dipenuhi oleh aktivitas yang tidak tertib akan segera direlokasi,” tambahnya.

Biasanya, aktivitas yang paling banyak dilakukan adalah berdagang di bahu jalan dan/ atau trotoar jalan. Meskipun program yang dilakukan adalah relokasi, tidak semua tempat bisa masuk program tersebut.

Itu terjadi karena tidak semua PKL masuk pendataan resmi. Karenanya, ada PKL yang direlokasi Pemprov dan ada juga yang direlokasi tetapi tidak disediakan tempat. Contoh lokasi yang sedang direlokasi itu, jelas Sulis, adalah Pasar Lorong 104.

Karena dianggap mengganggu ketertiban dengan aktivitas perdagangannya, semua PKL direlokasi ke Lorong 103 yang lokasinya lebih tertib.

“Tetapi pada saat bersamaan, ada juga PKL yang ditertibkan tapi tidak disediakan tempat karena mereka berdagang di lokasi terlarang. Untuk Lorong 103, itu direlokasi karena ada kesepakatan di Pemprov,” tandasnya.